

LAPORAN TAHUNAN

2024



LAPORAN TAHUNAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH



TIM MANAJEMEN

**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH
2024**



PENANGGUNG JAWAB:

Firdaus, SP., M.Si

PENYUSUN

Rizki Ardiansyah, SP, M.Si

Asis, MP

Masykura, S.ST

Fawwa Rahly, M.Si

Siti Rukmayani Japar, Amd

Devi Afdiansyah, A.Md

LAYOUT

Fawwa Rahly, M.Si

Ranandianita Masyurah, SP

Jl. T Nyak Makan Pahlawan No 27 Kota Banda Aceh

Email: bsip.aceh@pertanian.go.id

Website: <https://aceh.bsip.pertanian.go.id/>

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmatNya, Laporan Tahunan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Aceh Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan Tahunan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Aceh merupakan dokumen pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang mengacu pada tugas dan fungsi (Tupoksi) BPSIP Aceh yaitu melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi untuk mempercepat proses adopsi penerapan SNI tersebut oleh para pengguna (*user*).

Laporan tahunan ini memaparkan informasi terkait dengan kegiatan teknis, administrasi, dukungan manajemen dan keuangan DIPA BPSIP Aceh Tahun 2024. Pada tahun anggaran 2024, BPSIP Aceh mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 10.260.265.000,- dengan realisasi keuangan hingga 99.14%. Laporan tahunan BPSIP Aceh disusun dalam bentuk pertanggungjawaban Balai setiap tahunnya. Pemenuhan kinerja kelembagaan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Aceh.

Akhirnya tim manajemen mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan BPSIP Aceh TA. 2024 dan juga tim penyusun laporan ini.

Banda Aceh, 4 Januari 2024
Kepala Balai,

Firdaus, S.P., M.Si
NIP.19710805200604 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Visi.....	2
1.2. Misi	3
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Fungsi	3
1.5. Sasaran	4
1.6. Organisasi.....	4
II. SUMBERDAYA MANUSIA DAN ASET.....	8
2.1. Sumber Daya Manusia	8
2.2. Aset	10
III. Program dan Anggaran	19
IV. Kinerja Pelaksanaan Kegiatan.....	248
4.1. Hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.....	248
4.2. Diseminasi hasil standardisasi instrument pertanian.....	21
4.3. Pendampingan penerapan standar instrument pertanian.....	22
4.4. Produk instrument pertanian terstandar	28
4.5. Pelayanan Publik	36
V. REALISASI ANGGARAN	42
VI. PENUTUP	45



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tenaga ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024.....	8
Tabel 2. Sebaran Tenaga ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024.....	8
Tabel 3. Fungsional BPSIP Aceh Tahun 2024	9
Tabel 4. Tenaga ASN Berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional dan Pendidikan	10
Tabel 5. Rekapitulasi <i>Stock Opname</i> Persediaan BPSIP Aceh 31 Desember 2024	11
Tabel 6. Rekapitulasi Aset Tetap BPSIP Aceh Tahun 2024	11
Tabel 7. Pagu Pada Program Kerja BPSIP Aceh TA 2024.....	19
Tabel 8. Rencana Kerja BPSIP Aceh TA.2024.....	14
Tabel 9. Perjanjian Kinerja BPSIP Aceh 2024	15
Tabel 10. Revisi Anggaran BPSIP Aceh 2024	15
Tabel 11. Lembaga Pendampingan Penerapan SIP.....	129
Tabel 12. Perbandingan Standar Mutu Benih yang dihasilkan.....	23
Tabel 13. Standar mutu benih yang dihasilkan.....	39
Tabel 14. Rekapitulasi pelayanan permohonan informasi publik BPSIP TA. 2024.....	40
Tabel 15. Rekapitulasi pelayanan pengaduan BPSIP Aceh Tahun 2024	40
Tabel 16. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	43
Tabel 17. Realisasi Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.....	43
Tabel 18. Realisasi Anggaran Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	43
Tabel 19. Realisasi Anggaran Dukungan dan Manajemen	43



DAFTAR GRAFIK

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	5
Gambar 2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Teknis 2024.....	19
Gambar 3. Diagram alur kegiatan Identifikasi SIP	20
Gambar 4. Pendampingan Penerapan Lembaga Standar Instrumen Pertanian	22
Gambar 5. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.....	228
Gambar 6. Pendampingan Penerapan SIP di Aceh Selatan.....	26
Gambar 7. Pendampingan Penerapan SIP di Pidie Jaya	28
Gambar 8. Pendampingan Penerapan SIP di Simeulue	29
Gambar 9. Kerangka pelaksanaan kegiatan produksi benih padi	33
Gambar 10. Produksi Benih Padi Unggul Terstandar	36
Gambar 11. Produksi Benih Jagung Unggul terstandar	38
Gambar 12. Jenis buku dan publikasi yang tersedia di perpustakaan	41
Gambar 13. Hasil Penilaian SKM BPSIP Aceh 2024	42

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sebagai transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada tanggal 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022. BSIP berperan untuk merumuskan dan mengkoordinasikan standar instrumen pertanian, serta untuk mengharmonisasikan penerapan dan pemeliharaan standar instrumen pertanian. Selain itu, BSIP juga memiliki peran untuk mendesain proses bisnis pengembangan benih/bibit dari hulu hingga hilir yang dapat menjamin ketersediaan benih/bibit secara terus menerus dengan jumlah yang cukup, sesuai dengan musim tanam, yang merupakan kunci utama pengembangan dan peningkatan produktivitas hasil pertanian. Formula standar dan dukungan teknis penerapan SNI harus secara luas tersedia di daerah. Dukungan terhadap penerapan instrumen pertanian standar dipastikan dengan aktif mengumpulkan masukan secara masif dari seluruh wilayah Indonesia. BSIP memiliki satuan kerja di setiap provinsi dan menjadi perpanjangan tangan dari BSIP yaitu Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP). BPSIP melaksanakan kebijakan standar alat pertanian secara berkelanjutan untuk mempercepat pengembangan dan penerapan standardisasi di bidang pertanian sekaligus menyelaraskan upaya dengan standar internasional negara lain.

Seiring dengan tuntutan pembangunan pertanian di Provinsi Aceh yang semakin kompleks, maka BPSIP Aceh yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang berada dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian akan terus meningkatkan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. BPSIP Aceh juga berperan dalam melaksanakan program strategis Kementerian Pertanian yang terintegrasi dalam program: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; 2) Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan 3) Dukungan Manajemen. Program strategis BSIP dalam mendukung kebijakan program nasional yang dapat berdampak pada peningkatan standar mutu dan produk pertanian yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing. Hal

ini menjadi tupoksi utama BSIP sebagai Lembaga baru setelah terjadinya transformasi kelembagaan berdasarkan terbitnya Pepres Nomor 117 Tahun 2022.

Dinamika perubahan lembaga ini merupakan semangat baru bagi Lembaga dalam menghasilkan instrumen pertanian yang meliputi; instrumen fisik, biologi dan sistem dalam menerapkan standar pada produk/barang, jasa, sistem, proses dan personal. Fokus kegiatan BPSIP Aceh Tahun 2024 yaitu: hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dibutuhkan; standar pertanian yang didiseminasikan; lembaga penerap standar yang didampingi dan produk instrumen tanaman pangan terstandar. Laporan tahunan yang disusun pada dasarnya merupakan hasil ekstraksi kegiatan yang dilaksanakan pada bidang manajemen, pelayanan penerapan, kerjasama dan perencanaan serta evaluasi. Laporan ini juga digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja BPSIP Aceh dalam menjalankan tupoksi Tahun Anggaran 2024. Acuan dari pencapaian indikator kinerja adalah perjanjian kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Balai dan Kepala BSIP sebagai atasan langsung (Eselon I). Perjanjian kinerja BPSIP Aceh secara teknis dijabarkan dalam 4 (empat) sub kinerja yaitu kegiatan teknis, pelayanan dan kerjasama serta dukungan manajemen.

1.1. Visi

Sesuai dengan Permentan No. 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP, BPSIP Aceh merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon 3 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), yang secara hierarki merupakan functional unit BSIP. Berdasarkan hierarchical strategic plan, maka BSIP menyusun Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebijakan, dan Program BSIP, yang selanjutnya pada tataran rencana strategis BPSIP/UPT (functional unit) dituangkan menjadi Rencana Operasional. Oleh karena itu, visi, misi, kebijakan, strategi, dan program BSIP 2023-2024 mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja BSIP, termasuk BBPSIP dan BPSIP Aceh.

Pelaksanaan penerapan dan desiminasi standar instrumen pertanian oleh BPSIP Aceh tahun 2024 disesuaikan dengan rencana strategis, visi dan misi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang merupakan penjabaran dari visi Kementerian Pertanian yang termaktub dalam Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2022-2024.

Visi BPSIP Aceh mengacu kepada visi Kementerian Pertanian yaitu:

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

1.2. Misi

Misi mengacu kepada Misi Kementerian Pertanian, yaitu:

- Mewujudkan ketahanan pangan
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana kementerian pertanian

1.3. Tujuan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSIP Aceh diarahkan untuk menggerakkan pembangunan pertanian sekaligus sebagai pusat informasi standarisasi instrumen pertanian serta bersama-sama dengan instansi lain di daerah menghasilkan, menyiapkan dan menyampaikan standarisasi pertanian kepada para pengguna (petani, pengusaha/swasta, praktisi, ilmuwan dan para pengambil kebijakan) untuk digunakan dalam mendukung pembangunan pertanian di Provinsi Aceh. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 BPSIP Aceh mempunyai Tugas **“Melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi”**.

1.4. Fungsi

Fungsi BPSIP Aceh adalah:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- c. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- d. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- e. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
- f. Pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi pertanian spesifik lokasi;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

1.5. Sasaran

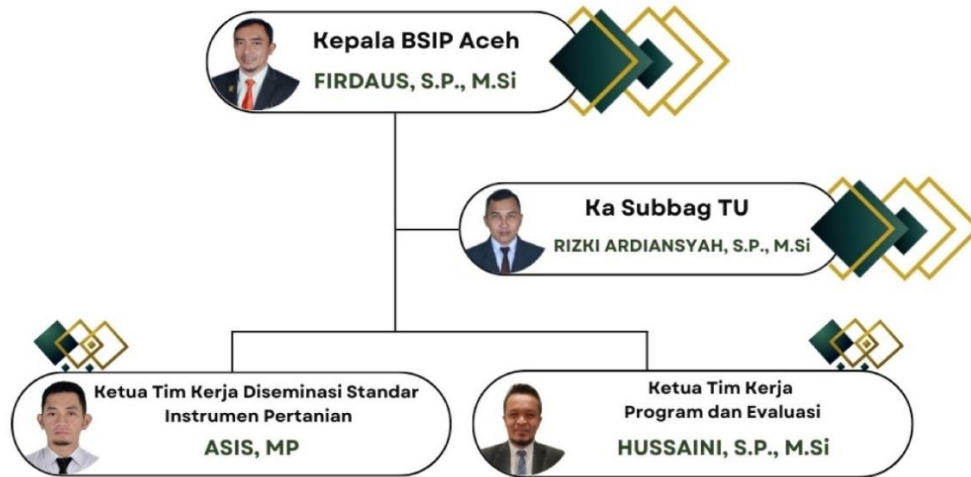
1. Meningkatkan ketersediaan informasi pertanian spesifik lokasi kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
2. Meningkatkan efektivitas diseminasi SNI pertanian unggulan dan materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
3. Meningkatkan kerjasama/kemitraan dengan stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
4. Meningkatnya kapasitas penyuluh daerah melalui pembinaan oleh penyuluh di BPSIP Aceh.
5. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas institusi serta sumberdaya manusia (SDM) BPSIP Aceh.

1.6. Organisasi

Dalam kerangka operasional, pelaksanaan visi dan misi BPSIP Aceh dicapai dengan adanya penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi di Provinsi Aceh dengan wilayah kerja terdiri dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, serta monitoring dan evaluasi untuk mendukung percepatan pembangunan pertanian di perdesaan melalui pendampingan lembaga penerap standar instrumen pertanian dan diseminasi penerapan standar. Sebagai pusat informasi terkait penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian, BPSIP Aceh terus bekerjasama dengan stakeholder baik itu pemerintah daerah, perusahaan maupun civitas akademika di Provinsi Aceh. Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur organisasi BPSIP Aceh berdasarkan Permentan No. 13 Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP terdiri dari (Gambar 1):

- a. Kepala Balai
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

- d. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh Tahun 2024

Tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi tersebut adalah:

1. Kepala Balai

- a. Memberikan arahan dan membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kerja;
- b. Mengusulkan pejabat fungsional yang akan ditugaskan menjadi Ketua Tim Kerja kepada Pejabat Tinggi Pratama untuk memperoleh penetapan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada unit kerjanya;
- c. Menerima dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kerja;
- d. Melakukan review, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kerja

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- a. Melaksanakan tugas sesuai arahan kepala UPT dan uraian pekerjaan
- b. Melakukan penyiapan bahan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, peraturan perundangan, reformasi birokrasi dan penerapan budaya kerja
- c. Melakukan pengelolaan gratifikasi
- d. Melakukan fasilitasi kegiatan penerapan sistem manajemen mutu berstandar internasional
- e. Melakukan kegiatan pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau pembantuan UAPPA-B/W dan ULP
- f. Melakukan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan kebun percobaan dan laboratorium



- g. Melakukan penyusunan laporan pencapaian indikator utama Sub Bagian Tata Usaha,
 - h. Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan rumah tangga
3. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
- a. Melakukan pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
 - b. Melakukan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
 - c. Melakukan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi
 - d. Melakukan pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik Lokasi
4. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
 - b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
 - c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
 - d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
 - Melakukan inventarisasi dan identifikasi penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
 - Melakukan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis pertanian
 - Menyusun laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas
 - Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.



b. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

- Melakukan penyusunan rencana kerja kegiatan penyuluhan pertanian dengan hasil kerja berupa rencana kerja kegiatan penyuluhan pertanian
- Melakukan perakitan materi penyuluhan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- Melakukan bimbingan teknis penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- Melakukan pengembangan metode penyuluhan
- Melakukan tugas pendampingan penerapan standar instrumen pertanian mendukung pelaksanaan program strategis pertanian
- Pengawasan dan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah binaannya.
- Menyusun laporan hasil kegiatan penyuluhan pertanian dan mendokumentasikan hasil kegiatan penyuluhan petani

I. SUMBERDAYA MANUSIA DAN ASET

1.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan 31 Desember 2024, BPSIP Aceh memiliki sumberdaya manusia sebanyak 65 orang, yang terdiri dari struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 pegawai pejabat struktural, 31 pegawai fungsional khusus dan 32 pegawai fungsional umum. Sebaran jumlah tenaga BPSIP Aceh menurut pangkat dan golongan, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tenaga ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024

PANGKAT	GOLONGAN				JUMLAH	%
	A	B	C	D		
I	0	0	0	2	2	3
II	0	5	4	10	19	29
III	6	18	8	8	40	62
IV	2	1	1	0	4	6
Jumlah	8	24	13	20	65	100

Kategori jumlah ASN berdasarkan pangkat dan golongan ASN BPSIP Aceh tahun 2023 berjumlah; Golongan I (3%), Golongan II (29%), Golongan III (62%), dan Golongan IV (6%). Sebaran jumlah ASN BPSIP Aceh berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran Tenaga ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

Unit Kerja	Pendidikan										Total
	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
BPSIP Aceh	1	19	10	3	1	-	-	16	2	2	54
IP2SIP Gayo	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	5
IP2SIP Paya Gajah	-	1	-	-	1	-	-	4	-	-	6
Jumlah	1	20	10	4	3	-	-	23	2	2	65

Berdasarkan kategori Jabatan Fungsional di Tahun 2024 Pegawai BPSIP Aceh didominasi Penyuluh dengan jumlah 15 orang, Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dengan jumlah 12 orang, Teknisi Litkayasa dengan 3 orang, dokter hewan, PKT dan Analis keuangan masing-masing 1 orang. Keragaman jumlah PNS menurut Jabatan Fungsional dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Fungsional BPSIP Aceh Tahun 2024

No	Fungsional	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	Madya	0
		Muda	3
		Pertama	8
2.	Penyuluh	Madya	4
		Muda	9
		Pertama	1
3.	Teknisi Litkayasa	Penyelia	0
		Terampil	2
		Pemula	1
3.	Dokter Hewan Karantina	Madya	0
		Muda	0
		Pertama	1
4.	PKT	Penyelia	0
		Terampil	1
		Pemula	0
5.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Madya	0
		Muda	0
		Pertama	1
Jumlah			31

Sementara itu keragaman jumlah Fungsional PNS BPSIP Aceh berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tenaga ASN Berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional dan Pendidikan

No	Jabatan Fungsional	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	
1	PMHP Utama	-	-	-	-	-	-	-
2	PMHP Madya	-	-	-	-	-	-	-
3	PMHP Muda	-	3	-	-	-	-	3
4	PMHP Pertama	-	6	2	-	-	-	8
5	Litkaysa Mahir	-	-	-	-	-	-	-
6	Litkayasa Terampil	-	-	-	-	2	-	2
7	Litkayasa Pemula	-	-	-	-	-	1	1
8	Penyuluh Madya	-	4	-	-	-	-	4
9	Penyuluh Muda	1	3	3	2	-	-	9
10	Penyuluh Pertama	-	-	-	1	-	-	1
11	Dokter Hewan Karantina Madya	-	-	-	-	-	-	-
12	Dokter Hewan Karantina Muda	-	-	-	-	-	-	-
13	Dokter Hewan Karantina Pertama	-	-	1	-	-	-	1
14	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya	-	-	-	-	-	-	-
15	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	-	-	-	-	-	-	-
16	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	-	-	1	-	-	-	1
17	PKT Mahir	-	-	-	-	-	-	-
18	PKT Terampil	-	-	-	-	-	1	1
19	PKT Pemula	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	16	7	3	2	2	31

2.2. Aset

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Aceh memiliki Barang Milik Negara (BMN) cukup banyak untuk menunjang berjalannya tugas dan fungsi balai yang tersebar di Kantor Induk di Banda Aceh, Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Paya Gajah di Aceh Timur dan IP2SIP Gayo di Bener Meriah. BMN meliputi barang persediaan dan juga aset tetap memiliki jumlah yang berubah setiap tahunnya sesuai dengan belanja yang direalisasikan pada tahun berjalan. Pada 31 Desember tahun 2024 ini *Stock Opname* Persediaan pada BPSIP Aceh sebagai berikut:

Tabel 5.Rekapitulasi *Stock Opname* Persediaan BPSIP Aceh 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Bahan Konsumsi	236 Unit	ATK
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	18.000 Kg	Benih Padi

BMN berupa aset tetap pada tahun 2024 di BPSIP Aceh terjadi penambahan dan pengurangan. Penambahan Aset terjadi karena ada belanja 53 dan juga pencatatan perolehan lainnya terhadap belanja 52 yang memiliki masa pakai lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai di atas Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per unitnya. Sedangkan pengurangan terjadi karena terbitnya SK penghapusan terhadap aset-aset yang telah dilakukan penjualan melalui lelang dan penghapusan aset dengan sebab lain-lain. Sehingga aset yang tercatat pada BPSIP Aceh tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 6.Rekapitulasi Aset Tetap BPSIP Aceh Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah			Total Aset
		Kantor Induk	KP Paya Gajah	KP Gayo	
1	Tanah	-	1.407.234 m ²	194.963 m ²	1.602.197 m ²
2	Bangunan dan Gedung	30 Unit	13 Unit	11 Unit	54 Unit
3	Rumah Negara	19 Unit	12 Unit	10 Unit	41 Unit
4	Peralatan dan Mesin	549 Unit	11 Unit	186 Unit	746 Unit
5	JII	3 Unit	1 Unit	1 Unit	5 Unit
6	Aset Tetap lainnya	575 Unit	-	-	575 Unit
7	Aset Tetap tak berwujud	2 Unit	-	-	2 Unit

Aset tanah yang tercatat pada BPSIP Aceh telah tersertifikasi atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertanian. Pada tahun 2024 terdapat penambahan catatan Bangunan dan Gedung sebanyak 1 Unit berupa Pagar Permanen yang berlokasi di Bener Meriah. Terdapat Bangunan dan Gedung yang memenuhi kriteria Properti Investasi yaitu Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen NUP 6 yang disewakan sebagai kantor oleh Koperasi Produsen Anugerah Agro Lestari terhitung sejak 26 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2029. Selain itu pada KP Paya Gajah juga terdapat bangunan dan gedung yang dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 Unit dan sedang dalam proses pengusulan penghapusan. Bangunan untuk kandang sebanyak 3 unit berlokasi di Jeumpa, Bireuen dibangun diatas



tanah milik Yayasan Sukma masih belum dihibahkan dan proses usulan masih di Setjen Kementan. Untuk Rumah Negara mengalami kerusakan berat dan sedang dalam proses pengusulan penghapusan sebanyak 3 unit dan berlokasi di KP Paya Gajah berupa Rumah Negara Golongan II Tipe C Semi Permanen. BPSIP Aceh memiliki kendaraan bermotor roda 4 sejumlah 10 unit, Roda 3 sejumlah 7 unit dan roda 2 sejumlah 16 unit. Pada peralatan dan Mesin pada tahun 2024 terdapat pengurangan aset karena terbitnya SK Penghapusan terhadap aset yang telah dilakukan lelang pada tahun 2023, dan juga terdapat penambahan aset karena belanja pengadaan barang pada transaksi tahun 2024.

III. Program dan Anggaran

Perencanaan Program dan Anggaran

Perencanaan program dan anggaran merupakan aspek krusial dalam melaksanakan program yang efektif dan efisien untuk mencapai target yang telah ditentukan. Dengan adanya proses perencanaan anggaran maka segala aspek pelaksanaan program dapat dilakukan secara terstruktur dan dapat dilakukan pemantauan pelaksanaan program serta penggunaan anggaran. Penyusunan perencanaan program anggaran BPSIP Aceh telah disusun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). DIPA dan POK digunakan sebagai pedoman resmi untuk melaksanakan tugas BPSIP Aceh.

Pada tahun anggaran 2024 Program rencana kerja BPSIP Aceh terdiri dari tiga program yaitu: 1) Program Nilai Tambah dan Saing Industri, 2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan 3) Program dukungan manajemen. Penyusunan pagu indikatif telah dilakukan pada ketiga program kerja tersebut. Adapun total pagu indikatif BPSIP Aceh sebesar Rp. 9,810,513,000,- setelah revisi kedua belas yang merupakan revisi terakhir menjadi sebesar Rp.10,260,265,000,-. Diantara alokasi anggaran tersebut terdiri dari: 1) Belanja Pegawai Rp. 5.205.217.000; 2) Belanja operasional perkantoran Rp. 1.920.550.000; 3) Barang non operasional Rp. 2.978.017.000,- dan 4) Belanja Modal Rp. 156.481.000,-. Secara rinci program dan anggaran kerja TA 2024 BPSIP Aceh disajikan pada tabel 7 dan 8 berikut.

Tabel 7. Pagu Pada Program Kerja BPSIP Aceh TA 2024

NO	Program/Kegiatan	Anggaran
	Total	10,260,265,000
	Program Nilai Tambah Daya Saing Industri	1.654.738.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1.654.738.000
	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	600.000.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	600.000.000
	Program Dukungan Manajemen	7.623.912.000
3	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	7.623.912.000

Tabel 8. Rencana Kerja BPSIP Aceh TA.2024

Kode	Program/Kegiatan/Output	Satuan
018.09	Badan Standardisasi Instrumen Peranian	
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
018.09.EC.6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	
018.09.EC.6916.ADA	Standarisasi Produk	
6916.ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang ditentukan	Dokumen Standar
018.09.EC.6916.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	
6916.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan	Orang
018.09.EC.6916.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	
6916.BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	Lembaga
018.09.EC.6916.BJA	Penyidikan dan pengujian produk	
6916.BJA.110	Instrumen Pertanian Terstandar yang diuji	Produk
018.09.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan berkualitas	
018.09.HA.6915	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	
018.09.HA.6915.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan	
6915.CAG.101	Produksi Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	Ton
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	
018.09.WA.6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	
018.WA.6918.EBA	Layanan Dukungan manajemen Internal	
018.WA.6918.EBA.956	Layanan BMN	Layanan
018.WA.6918.EBA.962	Layanan Umum	Layanan
018.WA.6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan
018.WA.6918.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
018.WA.6918.EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit
018.WA.6918.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	Unit
018.WA.6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	
018.WA.6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan
018.WA.6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan
018.WA.6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan

Perencanaan Anggaran BPSIP Aceh telah dilaksanakan dengan baik guna mencapai perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja yang disusun adalah dokumen kesepakatan antara pimpinan satuan kerja (BPSIP Aceh) kepada Kepala Unit Kerja (BSIP). Pimpinan kerja disusun setelah terbitnya DIPA serta akan direvisi pada setiap terjadi Perubahan DIPA pada tahun berjalan. Berikut disajikan Perjanjian Kinerja BSIP Aceh Tahun 2024.

Tabel 9.Perjanjian Kinerja BPSIP Aceh 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	10.000
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	31
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh (Nilai)	82
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh (Nilai)	93,92

Revisi Anggaran

Penyusunan perencanaan anggaran telah dilakukan melalui penyusunan matrix program, penyusunan RKA-KL yang dilengkapi dengan RAB dan KAK. Perencanaan anggaran ini tentunya tidak lepas dari dinamika kebijakan, sehingga terjadi beberapa kali perubahan (revisi anggaran) baik dari segi pengurangan atau penambahan. Pada Tahun anggaran 2024 BPSIP Aceh terjadi 12 kali revisi DIPA secara rinci dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 10.Revisi Anggaran BPSIP Aceh 2024

No	Tanggal	No. DIPA	Uraian Revisi
0	24/11/2023	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567392/2024	DIPA Awal
1	05/01/2024	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567392/2024	Revisi DIPA revocusing anggaran
2	23/01/2024	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567392/2024	Revisi DIPA SPAA
3	15/02/2024	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567392/2024	Revisi DIPA tambahan alokasi anggaran kegiatan penerap
4	20/02/2024	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567392/2024	Revisi halaman DIPA trw I

No	Tanggal	No. DIPA	Uraian Revisi
5	22/04/2024	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567392/2024	Revisi pemutakhiran halaman DIPA trw II
6	26/05/2024	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567392/2024	Revisi mutasi KRO, RO alokasi pendapatan PNB
7	06/06/2024	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567392/2024	Revisi Blokir PNB dan mutasi KRO, RO alokasi pendapatan PNB
8	13/07/2024	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567392/2024	Revisi POK perubahan judul kegiatan (komoditas perkebunan ke komoditas pangan)
9	25/07/2024	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567392/2024	Revisi POK dan perubahan halaman III DIPA
10	17/09/2024	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567392/2024	Optimalisasi Belanja Pegawai dan alokasi belanja modal
11	07/11/2024	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567392/2024	Delete rincian kertas kerja alokasi blokir PNB
12	15/11/2024	NOMOR : SP DIPA-018.09.2.567392/2024	S-1023/MK.02/2024 Penghematan Perjadin

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Rangkain keberhasilan dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak lepas dari adanya kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev). Pelaksanaan monev bersifat sebagai pengawasan dengan tujuan untuk menilai proses perkembangan kegiatan serta kendala yang terjadi dalam mencapai output akhir. Kegiatan monev telah dilakukan pada tiga tahapan yaitu:

1. Monev Ex-Ante dilaksanakan melalui seminar proposal
2. Monev On-Going dilakukan pengawasan langsung pada kegiatan yang sedang berjalan
3. Monev Ex-Post dilakukan melalui seminar hasil dan evaluasi capaian kegiatan

Hasil monev disajikan dalam bentuk laporan yang lengkap dan transparan. Laporan monev mencakup seluruh hasil dari proses pemantauan dan evaluasi. Selain pelaksanaan monev secara luring dilakukan juga monitoring melalui daring. Bentuk monev daring melalui pelaporan data progres kegiatan menggunakan aplikasi *Smart*, e-monev Bapenas, e-Monev BSIP dan E-sakip yang terintegrasi dengan aplikasi SAKTI lingkup BSIP.



Gambar 2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Teknis 2024

IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN

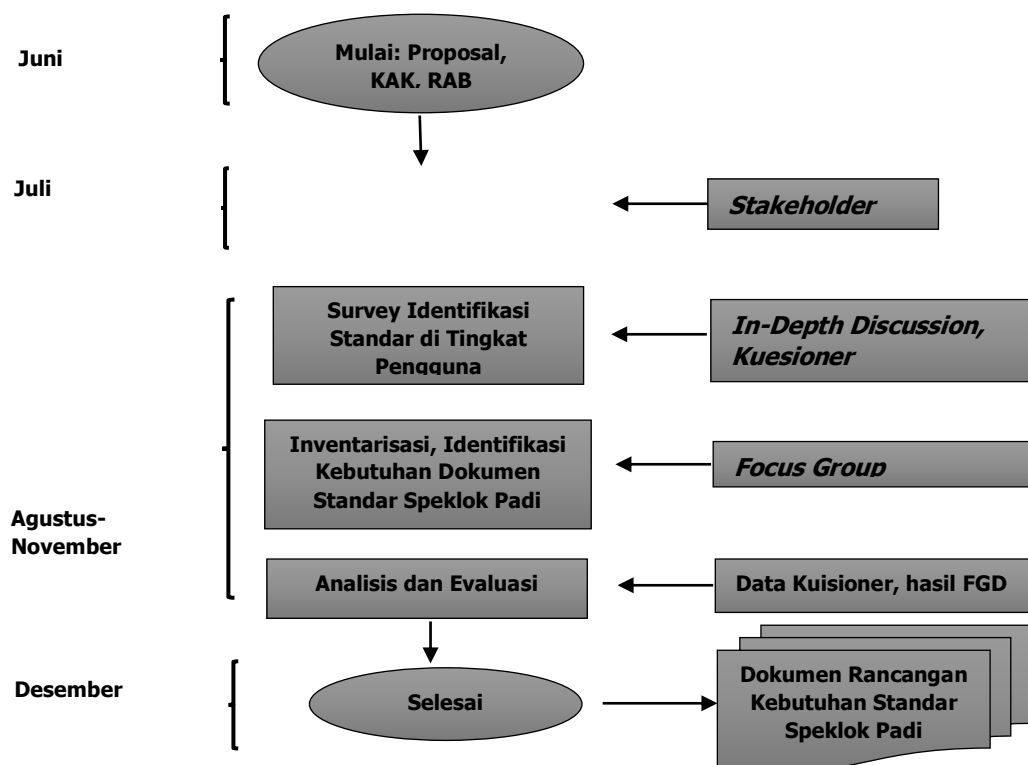
4.1. Hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi

Provinsi Aceh memiliki potensi sumberdaya lahan untuk pengembangan padi. Salah satunya kabupaten Aceh Utara yang merupakan kabupaten yang memiliki luasan sawah paling besar (54.189 Ha) dari total luasan lahan sawah 271.750 Ha di Provinsi Aceh. Sementara kabupaten Aceh Tengah yang berada di dataran tinggi Gayo meskipun bukan merupakan sentra produksi padi, namun potensi sumberdaya lahan yang tersedia bisa dimanfaatkan secara maksimal terutama untuk padi gogo. Varietas padi yang selama ini digunakan oleh masyarakat setempat yaitu varietas padi ciherang dan padi lokal. Selain itu varietas padi spesifik khusus dataran tinggi yang bisa ditanami yaitu Inpari 26, 27, 28, Gogo Luhur I hingga Gogo Luhur II, dengan hasil mencapai 4-5 Ton/ha.

Teknis budidaya padi yang baik tentunya mengacu pada konsepsi pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) yaitu pengelolaan sumberdaya yang berhasil untuk usaha pertanian dalam memenuhi kebutuhan manusia yang terus berubah dan sekaligus meningkatkan kualitas dan melestarikan sumberdaya alam. Standar untuk komoditas padi yang ada saat ini yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) 8969:2021 untuk *Indonesian good agricultural practices* (IndoGAP)-Cara Budidaya Tanaman Pangan yang baik menghasilkan benih padi spesifik lokasi yang sesuai standar sehingga berguna sebagai acuan penyusunan dokumen rancangan SNI untuk komoditas padi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi, mengverifikasi dan menyusun kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi padi di kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tengah. Sedangkan sasarannya adalah petani, kelompok tani, petugas lapangan (penyuluh, pengamat hama, mantri tani), penangkar padi dan stakeholder yang berperan pada bidang perpadian (dinas pertanian kabupaten, praktisi) di lokasi pelaksanaan kegiatan standar instrumen pertanian spesifik lokasi padi di Provinsi Aceh. Pelaksanaan kegiatan ini didominasi dengan koordinasi dan konsinyasi dengan semua pihak yang terkait dengan perpadian agar setiap potensi, permasalahan, dan faktor-faktor pendukung lainnya yang ada di lapangan dapat terhimpun.

Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi dilaksanakan di dua kabupaten yakni Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Tengah dengan pertimbangan Kabupaten Aceh Utara merupakan kabupaten sentra padi nomor satu terluas di provinsi Aceh yakni 54.723 ha pada tahun 2023 (BPS, 2023). Sedangkan kabupaten Aceh Tengah bukan sentra padi namun perlukiranya diidentifikasi juga kebutuhan standar instrumen pertanian komoditas padi khususnya padi di dataran tinggi Gayo. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari, Juni hingga Desember tahun 2024. Diagram alir kegiatan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 3. Diagram alur kegiatan Identifikasi SIP

Resume identifikasi standar instrumen pertanian Spesifik lokasi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Aceh telah melaksanakan kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi komoditas padi di dua kabupaten yakni kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tengah. Pengumpulan data dan informasi identifikasi dilaksanakan dengan dua cara yaitu survey dengan teknik interview menggunakan kuesioner terstruktur dan *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan survey dilaksanakan pada tanggal 25 September dan 1 Oktober 2024 dimasing-masing

kabupaten. Yang menjadi responden interview adalah petani padi dan stakeholder terkait yang terdiri dari petani, penyuluh, pengamat organisme pengganggu tanaman (POPT), dan koordinator BPP. Penyebaran kuesioner juga dilakukan secara online sehingga jumlah responden di masing-masing kabupaten sebanyak 30 orang.

Selanjutnya pengumpulan data dan informasi dilanjutkan melalui kegiatan FGD. Kegiatan FGD di kabupaten Aceh Utara dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024 di Aula Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Aron kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara. FGD ini langsung dihadiri oleh kepala dinas Erwandi SP., M.Si, kepala bidang produksi Abdul Jalil SP., M.Si, kepala bidang penyuluhan Faisal Mulyawan, SP, kelompok jabatan fungsional, POPT, penyuluh, penangkar padi, dan kelompok tani di tiga kecamatan yaitu kecamatan Syamtalira Aron, Nibong, dan Meurah Mulia. Pada tanggal 21 November 2024, FGD dilanjutkan di kabupaten Aceh Tengah bertempat di Aula Dinas Pertanian kabupaten Aceh Tengah yang dihadiri oleh sekretaris dinas Ir. Sukanto., MP, kepala bidang produksi Tamrin, SP, kepala bidang penyuluhan Hidayani, STP, kelompok jabatan fungsional, POPT, penyuluh, penangkar padi, dan kelompok tani di tiga kecamatan yaitu kecamatan Pegasing, Silih Nara dan Celala. Sebagai hasil dari kegiatan survey dan FGD, analisis data dan informasi identifikasi disajikan dalam bentuk "GAP Analysis" yang terdapat pada lampiran.



Gambar 4. Pendampingan Penerapan Lembaga Standar Instrumen Pertanian

4.2. Diseminasi hasil standardisasi instrument pertanian

Produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 14,46 juta Ton mengalami penurunan sebesar 2,07 Ton atau 12,5 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 16,53 juta Ton. Luas panen jagung pipilan pada 2023 diperkirakan sebesar 2,49 juta hectare, hal ini diperkirakan penyebab terjadi penurunan luas panen jagung di tahun 2023 sebanyak 0,28 juta hektare atau 10,03 persen dibandingkan luas panen pada 2022 yang sebesar 2,76 juta hectare (BPS, 2023). Untuk meningkatkan produksi jagung di tahun 2024, Kementan rencana melakukan ekstensifikasi seluas 1 (satu) juta hektar lahan di 38 Provinsi Indonesia (Kementan, 2023). Pada saat yang sama setiap tahun petani akan menggantungkan produktivitas usahatannya pada iklim dan cuaca. Dampak El Nino berupa penurunan curah hujan dari kondisi normal akan mempengaruhi ketersediaan air untuk pertumbuhan tanaman. ini akan menyebabkan penurunan efektivitas pemupukan dan terganggunya pertumbuhan tanaman sehingga terjadi risiko penurunan produksi sampai gagal panen.

Untuk mengantisipasi kondisi di atas, maka Kementerian Pertanian melaksanakan Upaya Khusus Percepatan dan Perluasan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung. kegiatan ini bertujuan untuk melakukan peningkatan kapasitas penerap standar instrumen pertanian (petani dan penangkar benih) padi dan jagung khususnya petani penerima bantuan benih, alsintan dan lainnya dalam kegiatan program UPSUS PAT padi dan jagung di provinsi Aceh.

Acara utama yang dilaksanakan adalah bimbingan teknis (bimtek) yang akan dihadiri sebanyak 10.000 peserta berupa petani dan penyuluh dari 3 kabupaten (Aceh Besar, Aceh Jaya dan Pidie). Pelaksanaan bimtek ini akan dilakukan bersamaan dengan jadwal kunjungan kerja Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Kunjungan kerja Mentan kali ini ke propinsi Aceh ini juga dalam rangka menindaklanjuti dari penandatanganan MoU dengan panglima TNI pada akhir 2023 lalu mengenai dukungan pelaksanaan pertanian. Kegiatan kunjungan menteri yang berpusat di lapangan tembak Kodam IskandarMuda Mata le Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan pada Selasa, 6 Februari 2024 mendatangkan 20.000 peserta yang terdiri dari Penyuluh Pertanian, Petani/Kelp Tani/Peternak, Pengecer Pupuk, Babinsa dan Bhabinkamtibnas yang akan mendapatkan

pembinaan melalui bimbingan teknis (bimtek). Hamper seluruh kabupaten mengirmkan wakilnya dalam kegiatan tersebut, peserta yang hadir terutama dari kabupaten Aceh Besar, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Pidie Jaya, Simeulue, dan Aceh Tengah.

Rangkaian acara bimtek dipandu oleh Dr. Didi Darmadi sebagai moderator yang memandu acara dengan tiga narasumber. Narasumber pertama Aditya Firdaus dari Holding Company Pupuk Indonesia yang menyampaikan kemudahan akses “Pupuk Bersubsidi”. Dalam paparannya narasumber pertama menjelaskan pentingnya penggunaan pupuk dan juga mekanisme penebusan pupuk bersubsidi menggunakan aplikasi *iPubers* hanya bermodalkan kartu identitas (KTP) petani. Narasumber kedua diisi oleh pejabat fungsional dari BSIP Aceh, M. Ismail, SP., M.Si yang memaparkan mengenai “Pengelolaan Usahatani Jagung Terstandar”. Dalam pemaparannya, narasumber kedua menjelaskan cara budidaya tanaman pangan sesuai SNI 8969:2021. Bimtek ini diakhiri dengan sesi diskusi dimana petani menanyakan alternatif solusi yang sering mereka hadapi di lapangan. Diharapkan dengan mengikuti bimtek ini dapat meningkatkan pengetahuan petani mengenai pengelolaan jagung yang optimal di lapangan sehingga produksi dan produktivitasnya dapat meningkat.



Gambar 5. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

4.3. Pendampingan penerapan standar instrument pertanian

Penerapan standar sangat ditentukan oleh sistem/proses budidaya yang baik dan benar atau *Good Agricultural Practices* (GAP). Istilah GAP identik dengan praktek pertanian berkelanjutan yang menggunakan pendekatan prinsip-prinsip bercocok tanam yang baik (Adinandra dan Totok, 2020). GAP juga berperan sebagai perwujudan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*). Artinya dengan penerapan GAP pada padi dapat

menjadi jaminan bagi petani dalam peningkatan produksi dan bagi konsumen bahwa produk yang dipasarkan diperoleh dari hasil serangkaian proses yang efisien, produktif dan ramah lingkungan. Dengan demikian petani akan mendapatkan nilai tambah berupa insentif peningkatan harga dan jaminan pasar yang memadai atau memenuhi standar pembelian. Salah satu upaya meningkatkan mutu dari produk padi adalah dengan mensosialisasikan dan mendiseminasikan tentang pentingnya SNI tersebut kepada kelompok tani. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan penerapan standar *Good Agricultural Practices* (GAP) sesuai dengan SNI 8969:2021 *good agricultural practices (IndoGAP)* pada kelompok tani padi di Provinsi Aceh. Secara spesifik, antara lain:

1. Melaksanakan identifikasi lembaga kelompok tani padi penerap standar.
2. Menginventarisasi kendala dan potensi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) *good agricultural practices (IndoGAP)* pada kelompok tani.
3. Melakukan sosialisasi Standar Nasional Indonesia *good agricultural practices (IndoGAP)* melalui pelatihan penerapan standar instrumen pertanian. Sedangkan sasarannya adalah petani, kelompok tani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), petugas lapangan (pengamat hama, mantri tani), pelaku usaha, dan stakeholder yang berperan pada komoditas padi di lokasi pelaksanaan kegiatan pendampingan penerapan standar di Provinsi Aceh.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif artinya secara teknis melibatkan langsung petani padi dalam melaksanakan setiap kegiatan, dalam hal ini menerapkan standar GAP yang sesuai dengan SNI 8969:2021 *good agricultural practices (IndoGAP)* pada tanaman padi. Kegiatan ini dilakukan pada tiga kelompok tani dari tiga Kabuata, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 11. Lembaga Pendampingan Penerapan SIP

No	Kabupaten	Nama Lembaga	Lokasi Lembaga	Luasan Lahan
1.	Simeulue	Gapoktan Aurifanta	Desa Lantik, Kecamatan Teupah Barat	27,26 Ha
2.	Aceh Selatan	Gapoktan Maju Sepakat Desa	Desa Ruak, Kecamatan Kluet Utara	20 Ha
3.	Pidie Jaya	Kelompok Tani Paya Setui	Desa Dayah Baro Kecamatan Ulim	25 Ha

Pelaksanaan FGD dan Pelatihan di Kabupaten Aceh Selatan

Kegiatan FGD melibatkan langsung petani padi dalam melaksanakan setiap kegiatan, dalam hal ini menerapkan standar GAP yang sesuai dengan SNI 8969:2021 good agricultural practices (IndoGAP) pada kelompok tani. Poin penting dari FGD yang telah dilaksanakan, yaitu: (a) Kabupaten Aceh selatan memiliki potensi pengembangan pertanian yang besar dengan luas areal persawahan mencapai 7.410 ha, dengan produktivitas 5,2 Ton/ha. (b) Petani di Kabupaten aceh Selatan belum sepenuhnya menggunakan benih bersertifikat, masih banyak petani yang menggunakan benih unggul dan bersertifikat, karena belum adanya penangkar benih. (c) Selama budidaya padi, terutama dalam proses pemupukan, masih banyaknya petani memberikan pupuk dengan dosis yang tidak tepat sesuai rekomendasi pupuk pada budidaya padi, sehingga terjadinya serangan OPT, seperti hawar daun (penyakit kuning). (d) Selain proses budidaya, saluran irigasi juga menjadi focus penting dalam ketersediaan air dengan adanya Pembangunan atau pemeliharaan irigasi untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses produksi. (e) Diharapkan dengan adanya Pendampingan penerapan SNI IndoGAP kepada kelompok tani diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang SNI IndoGAP sehingga dapat menerapkan SNI IndoGAP dalam proses produksi padi untuk peningkatan produktivitas.

Selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan pada komoditas padi terutama tentang teknik penerapan SNI Salah satu bentuk diskusi yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan Pelatihan, dengan tema **“Penerapan SNI 8969:2021 IndoGAP untuk Peningkatan Produktivitas Padi”**. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil FGD sebelumnya, yang dilaksanakan di Aceh Selatan. Bimtek ini dihadiri oleh petani dan penyuluh di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Materi pelatihan yang diberikan seperti Teknik Perbenihan Padi oleh Dr. Didi Darmadi, SP., M.Si, Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Padi oleh Ahmad Andriani, SP., Sekilas SNI 8969:2021 IndoGAP Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik oleh Rizki Ardiansyah, SP., M.Si. Peserta pelatihan ini terdiri dari Petani kelompok tani Sepakat Maju, Penyuluh Lapang BPP Kecamatan Kluet Utara. Harapannya, melalui pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola usahatani padi melalui penerapan standar nasional indonesia (SNI) indogap, dengan materi *sni 8969:2021 indogap cara budidaya tanaman pangan yang baik*,

pengendalian hama penyakit tanaman padi, dan peningkatan produktivitas padi melalui penerapan sni 6233:2015. Antusias petani terhadap bimbingan teknis sangat besar, mereka merasa kegiatan ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih baik terhadap penerapan budidaya padi untuk meningkatkan nilai tambah produksi.



Gambar 6. Pendampingan Penerapan SIP di Aceh Selatan

Pendampingan Penerapan IndoGAP Padi di Pidie Jaya

Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan tema “Penerapan SNI 8969:2021 IndoGAP untuk Peningkatan Produktivitas Padi” diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 di Ruang Aula Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya, dihadiri oleh 13 peserta, terdiri atas KTNA Kabupaten Pidie Jaya, Petani Milenial, Fungsional Penyuluh dan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. Ada beberapa point yang menjadi perhatian penting dari **FGD Penerapan SNI 8969:2021 IndoGAP untuk Peningkatan Produktivitas Padi** adalah sebagai berikut: (a) SNI IndoGAP adalah pedoman dari hulu ke hilir tentang cara budidaya yang baik untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan, khususnya komoditas Padi. Dimana saat ini produksi pertanian mengalami penurunan yang diakibatkan berkurangnya lahan pertanian, perubahan iklim, hama penyakit, dan minat masyarakat yang berkurang untuk berusaha tani akibat tidak terjaminnya pendapatan. (b) Mendorong petani untuk menggunakan benih berstandar, karena sudah dikaji untuk mendukung produktivitas dan pertanian yang berkelanjutan. (c) Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian yang bijak untuk mengurangi biaya produksi. (d) Ketersediaan kuota pupuk di pasar yang mengalami penurunan, petani dihibung untuk menggunakan pupuk organik. (e) Penanganan hama penyakit seperti tikus, bisa dilakukan secara alami dengan

memanfaatkan rantai makanan yaitu burung hantu sebagai predator. (f) Masih tingginya penggunaan pestisida kimia untuk pengendalian penyakit pada komoditas padi.

(g) Diperlukannya pengawasan secara mandiri yang dilakukan oleh petani untuk menjamin keberlanjutan usahatani padi untuk menerapkan SNI IndoGAP di lapangan atau anggota kelompok.

Pelatihan Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh T.A. 2024 dengan tema **“Pendampingan Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) Padi melalui SNI IndoGAP di Kabupaten Pidie Jaya”** diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 di Ruang Aula BPP Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, dihadiri oleh 30 peserta, terdiri atas Petani Kelompok Tani Paya Setui dan Fungsional Penyuluh dan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan BPP Kecamatan Ulim. Tujuan pelaksanaan pelatihan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas tentang Budidaya Padi yang Baik melalui penerapan (SNI) IndoGAP bagi kelompok tani. Tujuan pelaksanaan pelatihan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kapasitas tentang Budidaya Padi yang Baik melalui penerapan (SNI) IndoGAP bagi kelompok tani. Pelatihan penerapan GAP ini sangat penting untuk adaptasi menyesuaikan perkembangan zaman karena saat ini konsumen menuntut banyak standar mutu produk. Bermula dari benih, agar dapat diperoleh benih yang baik. Penerapan SNI ini banyak manfaatnya, terutama mutu produk, jaminan kesehatan, bebas residu bahan kimia.



Gambar 7. Pendampingan Penerapan SIP di Pidie Jaya

Pendampingan Penerapan IndoGAP Padi di Simeulue

Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Lembaga Penerap Standar Instrumen Pertanian melakukan Focus Group Discussion dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue. bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan permasalahan-permasalahan tentang teknis penerapan SNI IndoGAP padi. Secara spesifik tujuan kegiatan antara lain; (1) meningkatkan pemahaman dan minat petani lainnya tentang penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) IndoGAP Padi; (2) menjaring umpan balik terkait potensi dan kendala penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) IndoGAP Padi pada tingkat pelaku usaha dan stakeholder terkait lainnya. Banyak permasalahan yang dihadapi petani selama ini, terutama dari sisi produksi masih sangat rendah dibanding kabupaten lain seperti Aceh Barat Daya. Produktivitas padi Simeulue hanya 5-6 Ton/ha, masih jauh dari deskripsi varietas. Untuk itu BPP harus menjembatani ini agar disampaikan kepada seluruh PPL dan sampai ke seluruh petani. "Harapannya dengan pendampingan ini dapat meningkatkan produksi sehingga bisa meningkatkan hasil bahkan menjadi penyangga pangan untuk pantai barat Aceh".

Pelatihan bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan permasalahan-permasalahan tentang teknis penerapan SNI IndoGAP padi. Secara spesifik tujuan kegiatan antara lain; (1) meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola usahatani padi melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) IndoGAP Padi; (2) menjaring umpan balik terkait potensi dan kendala penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) IndoGAP Padi pada tingkat petani dan stakeholder terkait lainnya. Ruang lingkup kegiatan pendampingan pada komoditas padi tentang teknik penerapan SNI Salah satu bentuk diskusi yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan Pelatihan, dengan tema "**Penerapan SNI 8969:2021 IndoGAP untuk Peningkatan Produktivitas Padi**". Kegiatan dilaksanakan Kamis, (10/10/2024) bertempat di Aula Desa Lantik Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue. Materi pelatihan yang diberikan seperti Pengelolaan Usahatani Padi sawah Terstandar oleh M. Ismail, SP., M.Si, Teknik Perbenihan Padi oleh Asis, MP, Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Padi oleh Lamhot Edy Pakpahan, SP., Sekilas SNI 8969:2021 IndoGAP Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik oleh Rizki Ardiansyah, SP., M.Si.

Peserta pelatihan ini terdiri dari Petani kelompok tani Aurifanta, Penyuluh Lapang BPP Kecamatan Teupah Barat dan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) seluruh Kecamatan di Simeulue



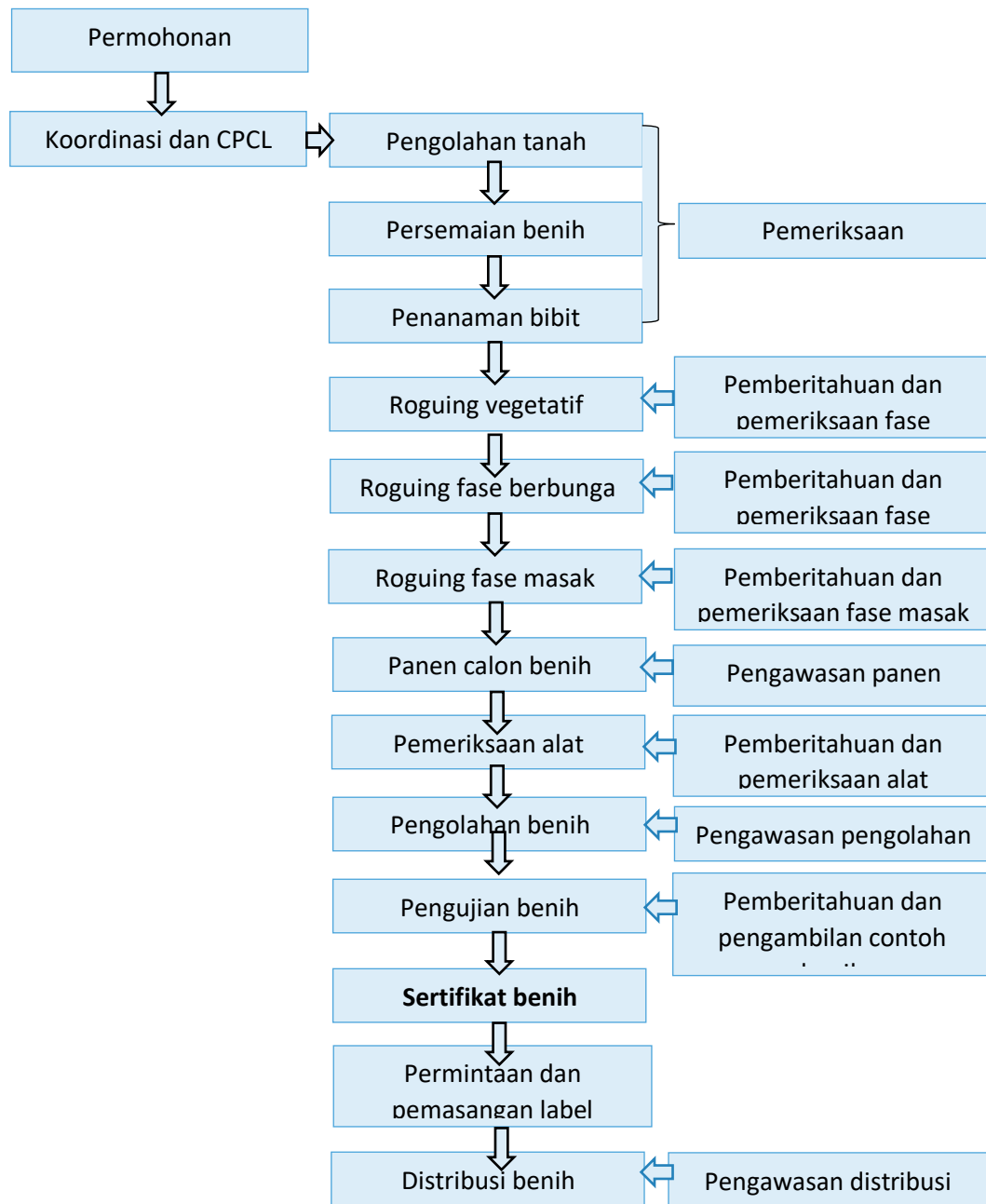
Gambar 8. Pendampingan Penerapan SIP di Simeulue

4.4. Produk instrument pertanian terstandar

4.4.1. Produksi benih padi terstandar

Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul merupakan pilar penting dalam peningkatan produktivitas tanaman pangan. Upaya produksi benih padi unggul terstandar dilakukan sesuai dengan persyaratan mutu dan dilakukan pengawasan pengendalian mutu benih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 39 tahun 2006, mekanisme pengendalian mutu dalam produksi benih dapat dilakukan melalui: (i) sistem sertifikasi benih yaitu pengawasan pertanaman dan/atau uji laboratorium oleh BPSB, atau (ii) penerapan system manajemen mutu (*quality management system*), atau (iii) sertifikasi produk.

Berdasarkan pentingnya ketersediaan benih sumber terstandar, maka BPSIP Aceh melakukan produksi benih padi unggul terstandar sesuai dengan standar mutu benih padi dan pengendalian mutu benih. Ketersediaan benih padi yang bermutu dapat menjadi salah satu jaminan dalam upaya peningkatan produksi padi nasional yang berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan benih sumber padi unggul terstandar 25 sebesar 25 Ton yang diproduksi di Desa Aneuk Glee, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar pada agroekosistem sawah dengan irigasi teknis yang terairi sepanjang tahun dan Desa Pasie Geulima, Teunom, Aceh Jaya pada agroekosistem sawah tadah hujan. Prosesdur produksi benih dilakukan dengan sistem bagi hasil produksi calon benih/gabah dengan petani pelaksana kegiatan dengan melalui tahapan sebagaimana dalam gambar berikut;



Gambar 9. Kerangka pelaksanaan kegiatan produksi benih padi

Proses produksi Penanaman padi dilakukan mengikuti prinsip Good Agricultural Practices (GAP) tanaman pangan yakni SNI 8969:2021 mulai dari tahap pengolahan tanah, pemeliharaan dan pasca panen. Adapun rincian yang telah dilakukan adalah:

1. Pengolahan tanah dilakukan untuk mengemburkan lahan, mengatasi laju erosi, membersihkan gulma, mempermudah dekomposisi bahan organik dalam tanah dan memudahkan penanaman bibit. Pengawasan pengolahan tanah dan persemaian dilakukan untuk memastikan bahwa pengolahan tanah telah dilakukan sesuai tahapan

pengolahan tanah lahan sawah. Pengolahan menggunakan bajak kasar dan halus secara bertahap sampai pada masa penggenangan lahan sebelum penanaman. Pengolahan tanah dilakukan dengan bajak kasar dan halus lebih kurang 15 hari pengerjaan. Selain pengolahan tanah, dilakukan persiapan tanam dengan persemaian benih pada lahan yang telah diolah terlebih dahulu sebanyak 75 kg untuk benih Mekongga dan 50 kg untuk Inpari 32

2. Penanaman dilakukan dengan pola tanam jajar legowo 2:1, dengan jarak tanam 25 cm x 12,5 cm x 50 cm dan jarak tanam tegel 25 cm x 25 cm. Bibit yang digunakan sebanyak 3 bibit per lubang tanam.
3. Pemupukan dosis pertama diberikan pada umur 14 HST dengan dosis NPK 150 kg/ha, Urea 100 kg/ha, KCl 50 kg/ha dan SP-36 50 kg/ha. Pemupukan susulan dilakukan pada umur 45-50 HST dengan dosis NPK 50 kg/ha dan Urea 100 kg/ha dengan cara menghambur pupuk pada areal penanaman lalu diinjak dengan kaki untuk membenamkan pupuk di dalam tanah. Pemupukan dilakukan pada pagi hari dengan kondisi lahan macak-macak (berair) untuk mempermudah pelarutan pupuk dalam tanah.
4. Roguing vegetatif dilakukan dengan mengamati karakter vegetatif tanaman seperti warna kaki, tipe pertumbuhan/bentuk tanaman, warna daun, lebar daun, dan kehalusan daun sesuai dengan deskripsi varietas. Hasil pengamatan lapangan BPSBTPHP Aceh oleh pengawas benih tanaman menunjukkan bahwa tanaman padi pada lahan produksi benih padi memiliki keseragaman yang tinggi sehingga memenuhi syarat untuk produksi benih pada fase vegetatif tanaman.
5. Roguing generatif dilakukan dalam 2 tahapan yaitu fase pembungan dan fase masak. Roguing generatif fase berbunga dilakukan pada umur 50 HST dengan karakter generatif yang diamati yaitu warna bunga, bentuk tanaman, warna daun, lebar daun, kehalusan daun, warna leher daun, tinggi tanaman, dan sudut daun bendera. Hasil pengamatan lapangan BPSBTPHP Aceh oleh pengawas benih tanaman menunjukkan bahwa tanaman padi pada lahan produksi benih padi memiliki keseragaman yang tinggi sehingga memenuhi syarat untuk produksi benih pada fase generatif tanaman.

6. Varietas Mekongga dan Inpari 32 telah memasuki masak fisiologi pada umur 115-120 hari setelah semai (95 HST) untuk dilakukan pemanenan.). Panen dilakukan dengan cara memoTong bagian tanaman (malai) pada bagian titik tumbuh tanaman padi dengan menggunakan sabit. Panen dilakukan secara konvensional (pemoTongan) dibandingkan dengan mesin panen (*Combine harvester*) untuk menghindari pencampuran calon benih dengan varietas lain, biji gulma dan hama penyakit terbawa alat panen. Calon benih yang telah dipanen harus sesuai dengan umur masak fisiologis 95% dan kadar air 21-25% sehingga perlu dilakukan penjemuran sampai kadar air dibawah 13%. Total produksi calon benih sebesar 21 Ton yang terdiri dari 15,4 Ton Mekongga dan 144 Ton Inpari 32.
7. Penanganan pasca panen berkaitan erat dengan prosesing calon benih untuk persiapan sertifikasi benih padi. Prosesing benih berupa pengangkutan, penjemuran, pembersihan, pengemasan dan penyimpanan. Pengangkutan dengan kendaraan roda 4 dari lahan petani pelaksana ke gudang prosesing BPSIP Aceh. Penjemuran calon benih dilakukan 4 hari sampai calon benih mencapai kadar air minimal 13%. Pembersihan benih dilakukan setelah penjemuran untuk dikemas dalam karung untuk persiapan pengambilan sampel calon benih oleh UPTD BPSB TPHP Aceh untuk dilakukan pengujian laboratorium sesuai standar mutu benih padi. Penyimpanan dilakukan pada gudang UPBS BPSIP Aceh dengan alas rak kayu sehingga benih tidak bersentuhan langsung dengan lantai gudang.
8. Sertifikasi benih dilakukan sesuai dengan standar mutu benih bersertifikat sehingga benih yang diproduksi memiliki mutu benih yang baik sesuai dengan standar. Penetapan kesesuaian produksi benih padi dengan standar mutu benih dapat dilakukan dengan cara pengamatan standar mutu benih di lapangan dan di laboratorium.
9. Pengemasan benih padi dilakukan untuk mempertahankan mutu benih tetap terjaga sesuai standar mutu benih. Kemasan benih padi BPSIP Aceh menggunakan kantung kedap udara yang kuat dan bersih, jenis *polyetilen* (PE) 0,08 mm dan salah satu permukaan kemasan transparan secara utuh.
10. Benih yang telah memiliki sertifikat mutu benih wajib memiliki label sebagai identitas benih yang melampirkan produsen/penangkar, varietas dan kesesuaian syarat mutu

benih. Warna label benih disesuaikan dengan kelas benih yaitu benih penjenis (BS) warna kuning, benih dasar (BD) warna putih, benih pokok (BP) warna ungu dan benih sebar (BR) warna biru. BPSIP Aceh memproduksi benih pokok (BP) sehingga menggunakan label berwarna ungu. Label BPSIP Aceh memiliki informasi yang jelas sesuai dengan standar pelabelan benih yang dilakukan oleh UPTD BPSB TPHP Aceh. BPSP TPHP berpedoman pada standar pelabelan sesuai Kepmentan Nomor 966 Tahun 2022.

Hasil Pengujian Produksi Benih Padi Unggul

Hasil pengujian sampel benih di laboratorium menunjukkan bahwa benih produksi BPSIP Aceh telah memenuhi syarat mutu benih terstandar sesuai dengan SNI 6233:2015 dan Kepmentan 966 Tahun 2022 dari komponen uji kadar air benih, benih murni, kotoran benih, benih tanaman lain, biji gulma dan daya kecambah benih. Hal ini menjadi landasan yang kuat bahwa benih sumber padi yang diproduksi telah memenuhi standar mutu benih padi sehingga layak untuk didistribusikan kepada masyarakat atau petani.

Tabel 12. Perbandingan Standar Mutu Benih yang dihasilkan

No	Parameter	Satuan	SNI 6233:2015	Kepmentan 966 Tahun 2022	Hasil Kegiatan
1	Isolasi Jarak (minimal)	m	2	2	3
2	Campuran Varietas Lain dan Tipe Simpang (maksimal)	%	0,5	0,5	0,1
3	Isolasi Waktu (minimal)	hari	21	21	25

Keterangan : SNI 6233:2015, 2 baris tanaman pinggir tidak boleh dipanen sebagai benih

Tabel 13. Standar mutu benih yang dihasilkan

No	Parameter Pengujian	Satuan	SNI 6233:2015	Kepmentan 966 Tahun 2022	Hasil Kegiatan
1	Kadar Air (maksimal)	%	13	13	11,6*
2	Benih Murni (minimal)	%	98	98	99,9
3	Kotoran Benih (maksimal)	%	2	2	0,1

No	Parameter Pengujian	Satuan	SNI 6233:2015	Kepmentan 966 Tahun 2022	Hasil Kegiatan
4	Banah Tanaman Lain (minimal)	%	0,2	0,2	0,2
5	Biji Gulma (minimal)	%	0,0	0,2	0,0
6	Daya Kecambah (minimal)	%	80	80	89*

Keterangan : * = hasil rata-rata pengujian 3 lot sampel benih



Gambar 10. Produksi Benih Padi Unggul Terstandar

4.4.2. Produksi benih jagung terstandar

Benih bermutu sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan produktivitas padi. Sifat-sifat yang dimiliki oleh benih unggul bermutu antara lain berdaya hasil tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit utama, umur genjah dan dapat dikembangkan dalam pola tanam tertentu. Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul merupakan pilar penting dalam peningkatan produktivitas tanaman pangan. BPSIP Aceh melalui salah satu lembaga pelayanan teknis di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) turut berperan dalam melakukan produksi benih jagung unggul terstandar. Benih jagung yang dihasilkan mengacu pada standard nasional indonesia tentang produksi benih jagung sehingga benih memiliki mutu yang terstandar. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan benih jagung unggul terstandar untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman jagung. Sasaran dari kegiatan ini adalah petani jagung, penangkar jagung dan pemerintah daerah yaitu Balai Benih Induk (BBI) maupun BBU.

Produksi benih jagung dilakukan di daerah sentral produksi jagung sehingga produksi benih jagung unggul terstandar dapat digunakan untuk petani pada musim tanam berikutnya. Kegiatan dilaksanakan pada lahan seluas 4 Ha di Desa Saree Aceh, Kec. Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar pada bulan Juli-Desember 2024 untuk menghasilkan benih bersertifikat makan proses produksi benih telah melalui 11 tahap kegiatan seperti Pendaftaran dan Pemilihan Lokasi, Penyiapan lahan. Penyiapan Benih dan Penanaman. Pemupukan. Roguing. Panen Benih. Prosesing Hasil Panen, Prosesing Benih, Pengemasan dan pelabelan. Proses produksi benih jagung juga melibatkan petugas BPSB provinsi Aceh. Secara rinci dijabarkan proses produksi yang telah dilaksanakan sebagai berikut;

1. Kegiatan pemeliharaan tanaman diantaranya pemupukan, pengendalian gulma, dan pengendalian hama dan penyakit tanaman. Tanaman terserang hama ulat grayak mulai pada fase generatif umur 45 HST. Pengendalian yang dilakukan menggunakan pengendalian manual yaitu dengan mematikan ulat yang tampak pada daun tanaman jagung. Selain itu juga dilakukan pengendalian menggunakan kimiawi dengan penyemprotan insektisida kontak dan insektisida sistemik. Penyakit yang menyerang tanaman jagung yaitu penyakit busuk akar, menyerang tanaman pada fase generatif saat tanaman mulai berbunga. Pengendalian penyakit telah dilakukan dengan melakukan penyemprotan kimiawi menggunakan fungisida.
2. roguing dilakukan di lokasi produksi benih jagung Desa Saree Aceh, Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat dan mengamati tipe simpang atau tanaman yang berbeda dari populasi tanaman. Perbedaan yang diamati yaitu perbedaan pada warna daun, warna pinggor daun dan warna rambut Tongkol.
3. Pengamatan dilakukan pada 100 tanaman sampel pada satu hektar lahan, untuk lokasi penanaman maka dilakukan terhadap 200 sampel tanaman untuk dua hektar lahan. Tim BPSB Bapak Ir. Amrullah, MS, Agus, SP dan Hasbi, SP melakukan pengamatan pada sampel yang ditentukan sebelum melakukan pengamatan.
4. Selanjutnya hasil dari pemeriksaan oleh tim BPSB terhadap tanaman jagung komposit varietas Sukmaraga dan varietas Bisma menyatakan bahwa tipe simpang pada tanaman jagung diareal penanaman 1 dan 2 tidak terdapat tipe simpang dari

populasi yang diperiksa. Hal ini terjadi kemungkinan karena kelas benih yang saat ini ditanam masih tinggi yaitu kelas benih penjenis (BS) label kuning. Hasil perbanyakan benih kelas BS ini adalah benih kelas BD atau benih dasar. Perbanyakan benih kelas BD ini masih dapat diperbanyak dua (2) kali lagi yaitu kelas benih pokok (BP) dan benih sebar (BR) dengan masing-masing memiliki label warna berturut-turut yaitu putih, ungu, dan biru.

5. Prosesing benih dilakukan dengan melakukan pengeringan Tongkol jagung hingga kadar air mencapai 19-20%. Pengukuran kadar air menggunakan alat ukur kadar air yaitu *Grain Seed Moisture* tipe standing. Biji pada Tongkol di pipil secara manual sekitar 50-70 butir hingga benih mencapai permukaan alat ukur kadar air, selanjutnya pada menu dipilih jenis benih yaitu jagung (CORN) selanjutnya ditekan tombol MEASURE (pengukuran). Pengukuran dilakukan 3 kali sehingga di dapat nilai rata-rata (AVERAGE) untuk kadar air biji jagung pasca panen (setelah penjemuran).
6. Selanjutnya biji yang telah dirontok dari Tongkol di jemur kembali hingga kadar air mencapai 11-12% maksimal. Setelah benih telah mencapai kadar air 11-12% maka benih dimasukkan dalam kantung plastik goni yang baru untuk penyimpanan sampai semua proses prosesing benih di satu varietas ini selesai. Setelah prosesing benih selesai maka Penjab Kegiatan produksi benih menghubungi petugas BPSP wilayah Kec Lembah Seulawah yaitu bapak Hasbi untuk melakukan pengambilan sampel benih untuk diuji mutu dan kualitas benih untuk proses sertifikasi.
7. Jumlah benih yang dihasilkan pasca panen mencapai 8,5 Ton dengan kadar air 26.7 %. Saat telah dilakukan prosesing dan sebagian benih yang telah dijemur dengan kadar air 11,2% mencapai 6 Ton. Proses pengeringan mengalami kendala intensitas hujan yang sangat tinggi sehingga proses penurunan kadar air membutuhkan waktu yang sangat lama. Penjemuran yang terkendala oleh hujan yang sangat deras menyebabkan sebagian benih mengalami kerusakan.



Gambar 11. Produksi Benih Jagung Unggul terstandar

4.5. Pelayanan Publik

BPSIP Aceh sebagai UPT BSIP memiliki tanggungjawab secara penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan informasi publik sesuai dengan ketersediaan layanan dan informasi. Maklumat layanan BPSIP Aceh adalah :

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku".

BPSIP Aceh memiliki 3 jenis layanan publik yaitu layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian, layanan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian, layanan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi.

1. Layanan Pengujian Penerapan

Laboratorim pengujian merupakan sarana untuk pengujian sampel tanah dan tanaman sesuai dengan unsur-unsur pengamatan yang diharapkan oleh pengguna. Laboratorium kimia tanah melayani permintaan analisis dari internal instansi, perguruan tinggi, perusahaan swasta dan instansi pemerintah lainnya. Keberadaannya juga untuk mendukung usaha pertanian dari para pengusaha pertanian besar maupun petani kecil. Laboratorium kimia tanah merupakan salah satu sarana pendukung penelitian dasar dan terapan, melayani permintaan analisis tanah, air dan pupuk organik. Analisis tanah yang dapat dilayani oleh BPSIP NAD berupa:

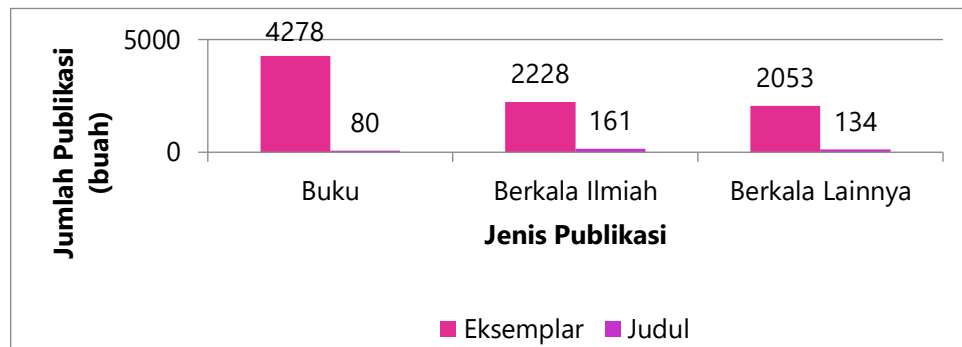
- Penetapan kadar air
- Penetapan pH H₂O dan CaCl₂ (pH tidak bisa analisis lagi karena pH meternya rusak)
- Penetapan salinitas tanah (ECe) dengan EC meter dan ECa (dengan EM-38)
- Penetapan salinitas air (ECw)
- Penetapan Nitrogen metoda penyulingan titrimetri dan kalorimetri
- Penetapan P & K potensial (ekstrak HCl 25 %) kalorimetri
- Penetapan C-Organik metoda walk leyand Black
- Penetapan Al-dd metoda tetrimetri
- Analisa N, P dan K dengan Paddy Soil Test Kit
- Penetapan tekstur tiga fraksi

Sedangkan analisis air yang dapat dilakukan baru mencakup penghitungan pH dan EC. Analisis pupuk organik: pH, N total, C-organik, C/N, P tersedia dan K & P total. Laboratorium kimia tanah BPSIP Aceh dikelola oleh satu orang staf. Laboratorium kimia tanah BPSIP Aceh didukung oleh beberapa instrumen seperti timbangan analitik, Spectrophotometer, Flamephotometer, Water Destilation Unit, Mikro Kjeldalh dan EM-38. Pada Tahun 2024, Laboratorium BPSIP Aceh tidak melakukan pelayanan pengujian sampel tanah, air, pupuk dan tanaman karena adanya kerusakan dan kalibrasi ulang alat-alat utama yang digunakan untuk analisis sampel.

2. Layanan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi

➤ Layanan Perpustakaan

Perpustakaan BPSIP Aceh memiliki koleksi-koleksi buku cetak, prosiding, risalah seminar, hasil penelitian dan pengkajian, liptan, *leaflet*, laporan teknis, skripsi, tesis, disertasi dan publikasi lainnya. Secara umum buku-buku dan hasil penelitian dan pengkajian tentang teknologi pertanian cukup tersedi di perpustakaan.



Gambar 12. Jenis buku dan publikasi yang tersedia di perpustakaan

➤ Layanan Kerjasama dan Magang

Magang mahasiswa merupakan salah satu bentuk dari implementasi kerjasama antara BPSIP Aceh dan Perguruan Tinggi di Aceh dalam diseminasi standar instrumen pertanian kepada pengguna, salah satunya mahasiswa. Jumlah kerjasama BPSIP Aceh pada Tahun 20024 sebanyak 9 kerjasama yang terdiri dari 6 Perguruan Tinggi, 2 Sekolah Menengah Atas dan 1 Instansi Pemerintah. Program magang mahasiswa pada Tahun 2024 didominasi oleh program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari perguruan tinggi. Selama tahun 2024, jumlah mahasiswa yang magang MBKM di BPSIP Aceh sebanyak 20 orang yang berasal dari Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala sebanyak 15 orang, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala sebanyak 5 orang.

➤ Layanan Konsultasi dan Rekomendasi

Pada Tahun 2024, BPSIP Aceh mendapatkan permohonan untuk rekomendasi pemupukan pada tanaman padi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh. Rekomendasi diberikan oleh BPSIP Aceh sesuai dengan ketentuan pemupukan pada tanaman padi yang diatur dalam Permentan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penggunaan dosis pupuk N, P, K untuk padi, jagung dan kedelai pada lahan sawah. Selain itu, konsultasi tentang penggunaan benih bermutu di wilayah Aceh dan besaran serta sebaran benih hasil produksi BPSIP Aceh.

3. Layanan pengelolaan produk

➤ Layanan UPBS

Upaya menghasilkan benih bermutu hanya diperoleh dari penyediaan benih sumber yang murni dan bermutu baik. Produksi dan distribusi benih memiliki rantai pasok yang panjang sehingga dipandang perlu membentuk Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) yang didukung oleh sumberdaya manusia yang handal dan profesional. UPBS berperan dalam pengelolaan produk hasil produksi benih sehingga sampai kepada petani atau Masyarakat pertanian yang membutuhkan benih sumber. Pada Tahun 2024, UPBS BPSIP Aceh melakukan pelayanan permintaan benih sumber (SS) varietas Mekongga oleh petani sebesar 6.850 kg atau 6,85 ton dengan skema diseminasi benih sebesar 2,965 ton dan penjualan (PNBP) sebesar 3,120 ton.

4.1. Pelayanan Informasi Publik

BPSIP Aceh sebagai UPT BSIP merupakan unit pelaksana teknis untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BSIP. Upaya mendukung pelayanan informasi publik maka BPSIP Aceh membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. PPID BPSIP Aceh berperan aktif untuk memberikan pelayanan informasi publik yang tersedia secara berkala, setiap saat dan serta merta sesuai dengan kebutuhan pemohon informasi. Pelayanan informasi publik dilakukan secara langsung melalui meja layanan informasi dan secara online melalui portal PPID, website (113 berita), instagram (227 berita), facebook (227 berita), X (227 berita), youtube (17 berita) dan kontak whatsapp.

Tahun 2024, BPSIP Aceh tidak menerima permohonan informasi publik dari masyarakat sehingga jumlah permohonan masih nihil.

Tabel 14. Rekapitulasi pelayanan permohonan informasi publik BPSIP TA. 2024

No.	Tanggal	Tanggal	No Pendaftaran	Nama Pemohon	Tipe	Informasi Publik		Tindak Lanjut	Status
	Pemohonan	Selesai Permohonan			Pemohon	Nama Info	Alasan		
1	Nihil	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Hasil rekapitulasi permohonan informasi publik BPSIP Aceh Tahun 2024

Hasil monev keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024 menunjukkan BPSIP Aceh memiliki nilai 88 atau kategori menuju informatif dari penilaian Self Quesionare Assesment (SAQ) dan Website.

Penanganan Pengaduan

Pengelolaan DUMAS bertujuan untuk memperoleh informasi dari masyarakat tentang pelayanan BPSIP Aceh sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan/masyarakat. Pengaduan masyarakat berkaitan erat antara kesesuaian Standar operasional pelayanan dan hasil pelayanan yang diberikan pelayan publik kepada masyarakat.

Pada tahun 2024, BPSIP Aceh tidak menerima pengaduan masyarakat terkait kinerja pelayanan publik dan/atau kinerja pegawai terhadap kinerja pelayanan dan/atau pegawai BPSIP Aceh. Jika terdapat pengaduan masyarakat maka akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola pengaduan masyarakat BPSIP Aceh untuk dilakukan evaluasi tentang pengaduan dan pemberian sanksi atau rekomendasi jika terbukti melakukan kesalahan.

Tabel 15. Rekapitulasi pelayanan pengaduan BPSIP Aceh Tahun 2024

No	Tanggal	Nama Pelapor/Alamat /Telepon	Substansi Pengaduan	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-

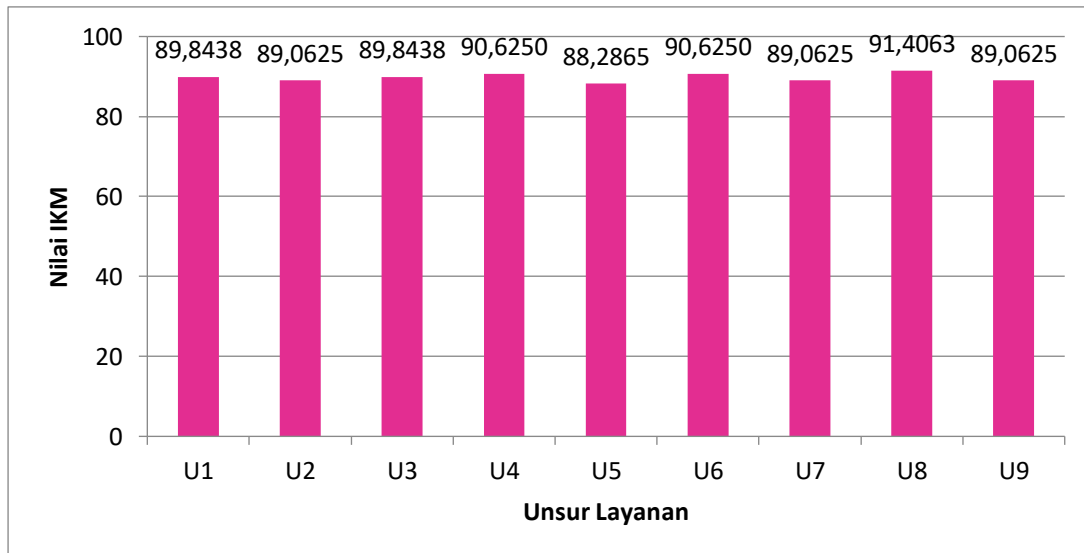
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

BPSIP Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan jenis layanan yang ada di BPSIP Aceh. BPSIP Aceh memiliki layanan pengujian, layanan penerapan dan diseminasi standar, dan layanan pengelolaan produk hasil standardisasi. Peningkatan terhadap jenis layanan BPSIP Aceh terus dilakukan dengan penyesuaian SOP sesuai dengan hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat/stakeholder yang memperoleh pelayanan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Keterlibatan masyarakat dalam menilai kualits pelayanan publik BPSIP Aceh merupakan

upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan menilai kinerja penyelenggara layanan serta menjadi dasar evaluasi untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

BPSIP Aceh melakukan survey kepuasan masyarakat berpedomanan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang unsur pelayanan. Unsur pelayanan meliputi persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.

Hasil SKM semester II Tahun 2024 sesuai dengan hasil analisis data memiliki rata-rata IKM sebesar 89,76 (Sangat Baik).



Gambar 13. Hasil Penilaian SKM BPSIP Aceh 2024

V. REALISASI ANGGARAN

Anggaran BPSIP Aceh dialokasikan sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2024 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: SP DIPA- 018.09.2.567392/2024, tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. 9.810.513.000. Setelah mengalami 12 kali revisi selama tahun berjalan, dikarenakan adanya kebijakan penganggaran berupa penambahan dan penyesuaian anggaran, maka jumlah alokasi Pagu DIPA Revisi Tahun 2024 terakhir sebesar Rp. 10.260.265.000. Adapun alokasi anggaran yang dapat dilaksanakan pada tahun berjalan sebesar Rp. 9.862.870.000. Sedangkan sisa sejumlah 397.395.000 adalah menjadi anggaran alokasi blokir.

Berdasarkan alokasi anggaran BPSIP Aceh, adapun jenis belanja (menurut DIPA tahun 2024) terdiri dari belanja pegawai, belanja barang (operasional dan non operasional) dan belanja modal. Realisasi anggaran BPSIP Aceh per 31 Desember Realisasi anggaran Tahun 2024 pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh dapat dirincikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi	Persentase (%)
Belanja Pegawai	5.205.217.000	5.153.503.379	99,01
Belanja Barang	4.898.567.000	4.466.126.830	91,17
Belanja Modal	156.481.000	156.300.000	99,88
Jumlah	10.260.265.000	9.775.930.209	95,28

BPSIP Aceh dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dalam mendukung program strategis Kementerian Pertanian yang terintegrasi dalam program: 1) Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; 2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan 3) Dukungan Manajemen. Program strategis BSIP dalam mendukung kebijakan program nasional yang dapat berdampak pada peningkatan standar mutu dan produk pertanian yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing.

1. Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri memiliki Pagu Anggaran Rp. 1.652.958.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.652.448.850 (99,97%). Realisasi anggaran Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Realisasi Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Satuan	Target	Des	Progres (%)	Pagu	Realisasi	%
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri					1.652.958.000	1.652.448.850	99,97
EC.6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian					1.652.958.000	1.652.448.850	99,97
ADA	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	Standar	1	1	100	100.000.000	99.933.900	99,93
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	Orang	10.000	10.000	100	1.368.220.000	1.368.023.500	99,99
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga	1	1	100	182.000.000	181.876.450	99,93
BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	Produk	3	3	100	2.738.000	2.615.000	95,51

2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Pagu Anggaran Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp. 586.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 585.827.000 (99,97%). Realisasi anggaran Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Realisasi Anggaran Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Satuan	Target	Des	Progres (%)	Pagu	Realisasi	%
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					586.000.000	585.827.000	99,97
HA.6915	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar					586.000.000	585.827.000	99,97
CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit	31	31	100	586.000.000	585.827.000	99,97

3. Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen terdiri dari Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Sarana dan Prasarana Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal yang memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.623.912.000, dengan realisasi sebesar Rp. 7.539.291.162 (98,89%). Realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen dapat dilihat pada Tabel 19

Tabel 19. Realisasi Anggaran Dukungan dan Manajemen

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Satuan	Target	Des	Progres (%)	Pagu	Realisasi	%
WA	Program Dukungan Manajemen					7.623.912.000	7.539.291.162	98,89
WA.6918	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian					7.623.912.000	7.539.291.162	98,89
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					7.264.744.000	7.180.964.506	98,85
EBA.956	Layanan BMN	Layanan	1	1	100	22.003.000	21.889.787	99,49
EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	1	100	116.974.000	115.266.940	98,54
EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100	7.125.767.000	7.043.807.779	98,85



Kode	Program/Kegiatan/KRO /RO	Satuan	Target	Des	Progre s (%)	Pagu	Realisasi	%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal					156.481.000	156.300.000	99,88
EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	100	6.481.000	6.300.000	97,21
EBB.971	Layanan Prasarana Internal	Unit	1	1	100	150.000.000	150.000.000	100,00
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal					202.687.000	202.026.656	99,67
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	1	1	100	98.000.000	97.933.880	99,93
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	1	1	100	40.000.000	39.525.160	98,81
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	1	1	100	64.687.000	64.567.616	99,82



VI. PENUTUP

- 1) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Aceh merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian pada Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) mengemban tugas dan fungsi sebagai lembaga yang melakukan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian. Tahun Anggaran 2024 kegiatan teknis dukungan manajemen mengacu pada perjanjian kinerja Kepala BPSIP Aceh terdiri 1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI) 2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian 3) Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan 4) Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM 5) Nilai kinerja anggaran (NKA) BPSIP Aceh.
- 2) Total anggaran yang bersumber dari APBN yang dikelola oleh BPSIP Aceh pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 10.260.265.000,-** dengan realisasi mencapai **95,28%**. Alokasi anggaran digunakan pada pelaksanaan kegiatan teknis, dukungan manajemen dan operasional perkantoran. Kegiatan teknis meliputi standardisasi produk, sosialisasi diseminasi, fasilitas dan pembinaan Lembaga dan program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Aceh didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berjumlah 64 orang ASN.
- 3) Kegiatan teknis tahun 2024 terdiri dari a) Hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi (padi), b) Diseminasi hasil standar instrumen pertanian, c) Pendampingan penerapan standar instrumen pertanian, d) Instrumen Pertanian Terapan yang diuji, dan e) Benih Tanaman Pangan.



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN ACEH**